



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI RABU, 08 APRIL 2026



Ketua H. Abdillah Nashih Wakil Ketua Suyarno, S.H., M.H. Wakil Ketua H. Kayan, SH Wakil Ketua Warih Andono, SE

## RINGKASAN BERITA HARI INI

### Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Proyek Flyover Gedangan

#### Pembebasan Lahan Dianggarkan Rp 200 M

**SIDOARJO** - Pemkab Sidoarjo memastikan jika kebijakan efisiensi tak menyentuh anggaran pembangunan. Sejumlah proyek strategis, termasuk pembebasan lahan Flyover (FO) Gedangan tetap jalan. Kebijakan efisiensi lebih banyak menyangkut anggaran kegiatan dinas.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo, Ainur Rohman mengatakan bahwa efisiensi diarahkan pada belanja non-prioritas. "Memang ada efisiensi. Namun, tidak menyentuh anggaran pembangunan," katanya kemarin (7/4).

Dia memastikan pembangunan tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah. Sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan

masyarakat tetap diprioritaskan. Seperti peningkatan jalan, normalisasi saluran, serta penguatan layanan kesehatan dan pendidikan.

#### DED Selesai Pekan Ini

Progres pembangunan juga dipastikan terus berjalan. Termasuk pembebasan lahan untuk proyek FO Gedangan yang dianggarkan Rp 200 miliar. Ainur menegaskan, Detail Engineering Design (DED) untuk FO ditargetkan rampung dalam pekan ini.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo Chusnul Inayah menegaskan bahwa setidaknya ada empat proyek strategis yang tetap berjalan. Yakni FO Gedangan, betonisasi ruas jalan, RSUD Sedati, dan perbaikan sekolah. "Kami optimis proyek bisa terealisasi," katanya. (ful/hen)



MANFAATKAN JARINGAN: Dua mahasiswa Umsida mengoperasikan PLTS yang dikembangkan untuk mendukung produksi garam.

### Dukung Produksi Garam, Dosen Umsida Kembangkan PLTS Berbasis Internet

**SIDOARJO** - Tim peneliti Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) yang dipimpin Dosen Umsida Dr Ir Jamaaluddin mengembangkan inovasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berbasis Internet of Things (IoT) untuk mendukung produksi garam. Jamaaluddin menjelaskan, sistem sengaja dirancang sebagai kampanye energi terbarukan. Teknologi ini mampu menjaga stabilitas produksi karena tidak bergantung pada kondisi cuaca seperti metode tambak tradisional.

Selain itu, sistem dilengkapi pemantauan jarak jauh melalui sensor suhu, kelembaban, dan kinerja panel secara real-time. "Inovasi telah kami berikan sebagai alat pembelajaran di SMK Pemuda Krian untuk mendukung praktik instalasi energi surya," katanya. (eza/hen)

### Setahun, 15 Perumahan Baru Ajukan Izin Pendirian

#### Buduran dan Sukodono Jadi Incaran Pengembangan

**SIDOARJO** - Jumlah perumahan di Kota Delta terus bertambah. Pertumbuhan itu bisa dilihat dari meningkatnya pengajuan izin pendirian perumahan. Selama 2025, Dinas Perkim Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas Perkim CKTR) Sidoarjo mencatat ada 15 izin pembangunan hunian yang masuk.

Kabid Tata Ruang Dinas Perkim CKTR Sidoarjo Triyanto mengatakan bahwa jumlah izin naik dibanding 2024. Pada tahun tersebut, hanya ada 14 izin yang masuk. "Ini menunjukkan kebutuhan hunian cenderung naik," kata Triyanto.

Dari data, sebaran pengembangan perumahan relatif merata di berbagai wilayah. Buduran dan Sukodono yang menjadi kawasan dengan jumlah terbanyak yang akan dibangun perumahan dengan masing-masing tiga izin. Disusul Candi, Krian, dan Prambon dengan dua lokasi. Semen-

taru itu, Krembung, Waru, dan Gedangan masing-masing satu lokasi.



TUMBUH MERATA: Selain Buduran dan Sukodono, kawasan Gedangan juga banyak dilincar pengembangan. Ada perumahan yang sedang dibangun di kawasan tersebut.

### Perubahan Skema KDMP Bebani APBN dan APBD

Sambungan dari Hal 1

Pembayaran dialihkan ke pemerintah melalui mekanisme transfer ke daerah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan tersebut berisiko menekan APBN, karena KDMP belum memiliki kapasitas keuangan memadai, terutama pada fase awal operasional. "KDMP akan kesulitan membayar pinjaman, apalagi masih tahun pertama. Risiko gagal bayar cukup tinggi, sehingga APBN harus menanggung cicilan ke bank-bank Hibarna," kata Bhima kepada Jawa Pos, kemarin (7/4).

**Program Belum Matang**  
Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, perubahan skema tersebut

mencerminkan perencanaan program yang belum matang. Dalam aturan terbaru, pembiayaan KDMP disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk mempercepat pembangunan gerai, pergudangan, dan fasilitas koperasi. Selain itu, plafon pembiayaan kini dihitung per gerai sebesar Rp 3 miliar, bukan lagi per koperasi. Skema itu berpotensi membuat biaya program membengkak tanpa kejelasan manfaat ekonomi. "Ini menunjukkan KDMP tidak direncanakan dengan baik, program besar dan mahal dilakukan secara tambal sulam," ungkap Wijayanto.

Dia juga menyoroti skema pembayaran yang mengandalkan pemotongan dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), serta dana desa. Kebijakan itu dinilai memberatkan pemerintah

daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas. "Kemungkinan besar KDMP tidak akan pernah mandiri secara keuangan, sehingga Pemda (lewat DAU) harus menanggung beban keuangan permanen," papar Wijayanto.

Wijayanto juga mengingatkan pemerintah potensi resistensi masyarakat karena KDMP bisa bersaing dengan warung tradisional dan pelaku UMKM. Dia mencontohkan KDMP di kawasan Blok M yang diluncurkan pada pertengahan 2025, namun mengalami kendala operasional. "Bisa jadi 90 persen lebih KDMP akan berujung pada kegagalan. Kalau yang di pusat saja sulit bertahan, apalagi yang di daerah terpencil," katanya.

**Rencana Jangka Panjang**  
Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan

pengembangan jangka panjang untuk Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipuh) menyebut, seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) akan didorong menjadi anggota koperasi. "Kalau dia menjadi anggota, mereka tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pemilik koperasi," paparnya.

Menurut dia, KPM dapat terlibat sebagai pegawai KDMP atau menjual produk hasil pelatihan Kemosos. Pemerintah juga menyesuaikan skema agar KDMP tak kalah bersaing dengan usaha yang sudah ada, termasuk berkolaborasi dengan BUMDES dan kelompok-kelompok usaha desa. "Koperasi diharapkan saling memperkuat. Pembeli diharapkan juga menjadi pemilik, ini yang istimewa," jelasnya. (mim/mia/aph)

### Tak Terima Atribut Kampanye Dibakar, Calon Kades Sidokepong Laporkan Polisi

#### Setelah Mediasi di Balai Desa Gagal

**SIDOARJO** - Pemilihan Kepala Desa (Pilades) di Sidokepong. Kecamatan Buduran memanas. Salah satu calon kepala desa (cakades) melaporkan polisi usul atribut kampanye dirusak dan dibakar oknum masyarakat. Mediasi yang digelar di balai desa mengalami jalan buntu.

Ketua Panitia Pilades Sidokepong Umar membenarkan adanya kejadian tersebut. Persepsi diawali dari terbakarnya satu balaiho di depan salah satu perumahan. Kejadian itu lanjut memicu emosi cakades dan pendukungnya.



MEMANAS: Balaiho bergambar calon kepala desa terpasang di Jalan Sidokepong, Buduran. Pilades di desa itu mendapat sorotan setelah terjadi penaklukan dan pendukungnya lantas melakukan aksi pelaporan di Polresta Sidoarjo. Mereka meminta pelaku ditangkap.

Umar menegaskan, panitia terus berupaya meredakan kemarahan pihak-pihak yang bertikai. Ada berkoordinasi dengan polisi. Meski persepsi, namun situasi masih kondusif.

**Jaga Kondusifitas**  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Probo Agus

menyatakan bahwa pelanggaran hak setiap warga negara. Tidak ada larangan terkait hal tersebut. "Boleh saja, itu kan hak setiap warga," ungkapnya. Meski begitu, Probo meng-

### Jembatan Jetis Retak, Hanya Bisa Dilalui Motor

#### Sudah Berlangsung Delapan Bulan

**SIDOARJO** - Sudah delapan bulan Jembatan Jetis di Kelurahan Lemahputro, Sidoarjo Kota, rusak. Namun, akses itu masih belum tersentuh perbaikan. Warga berharap

agar pembak segera melakukan perbaikan agar jembatan bisa dilalui secara normal. Saat ini, jembatan hanya bisa dilalui roda dua karena bagian ujungnya retak. Untuk mobil tak bisa melintas. Pengguna jalan khawatir kerusakan semakin parah jika tak segera diperbaiki.

"Untuk mengantisipasi kecelakaan, warga terpaksa pasang pembatas," kata Lukman, salah satu warga. Dia mengatakan bahwa warga juga memasang imbuhan di gapura Jalan Jetis agar mobil tak masuk jembatan. "Ini sebenarnya akses alternatif. Maka, cukup banyak

pengendara yang melintas," tambah Lukman.

#### Targetkan Perbaikan Tahun Ini

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Dwi M. Makhmud mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengecekan terkait kondisi jembatan

tersebut. Jembatan tersebut memang sudah masuk waktu untuk dilakukan pemeliharaan. Dari hasil peninjauan tim DPUBMSDA, beberapa titik jembatan mengalami ketretakan dan keropos sehingga perlu penanganan. "Segera kami usulkan untuk perbaikan. Kami berupaya tahun ini," jelasnya. (eza/hen)



CEGAH MOBIL LEWAT: Warga memasang pembatas jalan di jembatan untuk menghalau roda empat.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Beranda > Ketua DPRD Sidoarjo, Pelaku Industri Harus Perhatikan SOP Keselamatan Kerja

## Ketua DPRD Sidoarjo, Pelaku Industri Harus Perhatikan SOP Keselamatan Kerja

RedSidoarjo · April 08, 2026



Liputan5news.com - Sidoarjo. Insiden di pabrik PT Great Wall Steel, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, yang mengakibatkan sejumlah pekerja menjadi korban menuai sorotan. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdullah Nasih angkat bicara dan menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut.

Ia pun menilai kejadian ini menjadi alarm keras bagi pelaku industri, agar lebih serius menerapkan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan kerja. Nasih menegaskan, penerapan aturan yang sudah tertuang dalam peraturan daerah (perda) tidak boleh diabaikan.

"Para pelaku industri seharusnya benar-benar memperhatikan SOP keselamatan kerja. Ini harus ditegakkan secara maksimal, termasuk pelaksanaan peraturan daerah yang sudah ada," ujar Nasih saat ditemui awak media di ruang kerja Ketua DPRD Sidoarjo, Selasa (7/4/2026).

Nasih juga mendorong anggota DPRD Sidoarjo untuk terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas perda yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Menurutnya, jika ditemukan aturan yang tidak berjalan optimal maka perlu segera dilakukan perbaikan.

"Kami akan mendorong teman-teman anggota DPRD untuk mengevaluasi perda, apakah masih efektif atau tidak. Jika ada yang belum berjalan baik, tentu harus diperbaiki," tambahnya.

Selain itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta para OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar lebih aktif melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap perusahaan-perusahaan.

"Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perizinan hingga penerapan sistem keselamatan kerja di lapangan," kata Nasih.

Nasih mencontohkan, setiap perusahaan seharusnya memiliki sistem mitigasi risiko yang jelas, seperti titik kumpul saat kondisi darurat, sistem pencegahan kebakaran, hingga kelayakan instalasi peralatan kerja.

"Perusahaan harus memastikan semua prosedur berjalan, mulai dari titik kumpul, sistem pencegahan kebakaran hingga kelayakan instalasi. Jangan sampai ada peralatan yang sudah tidak layak pakai tetapi tetap dipaksakan," tegasnya.

Nasih menekankan pentingnya laporan berkala dari perusahaan kepada instansi terkait sebagai bagian dari pengawasan dan pengontrolan tersebut. Dengan begitu, kata dia, potensi risiko dapat dideteksi lebih dini dan dicegah sebelum menimbulkan korban.

"Kami berharap kejadian ini menjadi momentum evaluasi bersama baik pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun pelaku industri, untuk memperkuat sistem keselamatan kerja di Sidoarjo agar kejadian serupa tidak terulang kembali," pungkasnya. (Yanti)



Facebook



Twitter



# Ngaji Cerdas Bersama KH. Habib Amrullah Di Pendopo Delta Wibawa

Heri Margo 7 April 2026 0



SIDOARJO | [Suaralintasindonesia.com](https://suaralintasindonesia.com) -Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan Ngaji Cerdas Ahad Pahing bersama KH. Habib Amrullah sekaligus Halal bi halal di Pendopo Delta Wibawa. Selasa (7/4).

Kegiatan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo, Ainun Amalia yang mewakili Bupati Sidoarjo, H. Subandi, jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Sidoarjo, ratusan ibu-ibu Ketua TP PKK Kecamatan, Desa hingga Organisasi masyarakat.

Ainun Amalia menyampaikan harapannya agar kondisi global yang saat ini diwarnai berbagai konflik tidak memberikan dampak signifikan bagi Indonesia khususnya Kabupaten Sidoarjo.

"Kami memohon doa agar berbagai isu konflik yang terjadi didunia tidak berdampak terlalu dalam bagi Indonesia, khususnya Kabupaten Sidoarjo sehingga masyarakat tetap aman dan sejahtera", ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, Sriatun Subandi mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai sarana meningkatkan keimanan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat Silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri.

"Momentum ini selain untuk berdoa kepada Allah SWT demi keamanan dan Kesejahteraan kita semua, bangsa dan Sidoarjo, juga menjadi kesempatan untuk saling memaafkan antar sesama", ucapnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial serta semangat persatuan di tengah masyarakat Sidoarjo semakin kuat, sehingga mampu mendukung terciptanya kondisi daerah yang aman, damai dan sejahtera.

"Dengan saling bermaaf-maafan maka kita semua akan kembali fitri dan bersih,' pungkasnya. (Hr)

Previous

**Percepat Dan Perluas Transaksi Digital, Pemkab Sidoarjo Segera Terapkan QRIS Tap**



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



**ASPIRASI:** Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Muchammad Rafi Wibisono menyoroti ketimpangan antara tingginya investasi dan angka pengangguran.

## Investasi Capai Rp 18,88 Triliun

### ■ DPRD Soroti Pengangguran Masih Tinggi

DERASNYA arus investasi di Kabupaten Sidoarjo yang menembus Rp 18,88 triliun pada 2025 ternyata belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Di balik capaian tersebut, angka pengangguran masih tergolong tinggi.

Data menunjukkan, realisasi investasi Sidoarjo dalam lima tahun terakhir terus mencatat tren positif. Pada 2021 sebesar Rp 9,77 triliun, meningkat menjadi Rp 14,08 triliun pada 2022, sempat turun ke Rp 13,68 triliun di 2023, lalu kembali naik menjadi Rp 17,04 triliun pada 2024, hingga mencapai Rp 18,88 triliun pada 2025. Capaian ini bahkan melampaui target hingga 155,84 persen.

Namun, peningkatan investasi tersebut belum diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 masih berada di angka 5,75 persen, meski turun dari 6,49 persen pada tahun sebelumnya. Pengangguran didominasi lulusan SMA hingga sarjana.

Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Muchammad Rafi Wibisono,

● Ke Halaman 10

## Investasi Capai...

menilai kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pertumbuhan investasi dan kesiapan tenaga kerja.

“Investasi besar harus sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Jangan sampai angkanya tinggi, tapi pengangguran tetap tinggi,” tegasnya, Selasa (7/4).

Menurutnya, pemerintah daerah

tidak bisa hanya berfokus pada capaian nilai investasi semata. Dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas. Rafi pun mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Sidoarjo untuk memperkuat kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja.

Sinergi antarinstansi dinilai penting agar setiap investasi yang masuk mampu membuka lapangan

kerja secara maksimal, khususnya bagi warga lokal.

“Tidak cukup hanya menarik investor. Harus ada kolaborasi konkret dengan Dinas Tenaga Kerja agar kebutuhan industri selaras dengan kompetensi tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Selain itu, Rafi juga menyoroti pentingnya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penempatan

Tenaga Kerja Lokal. Dalam aturan tersebut, perusahaan diwajibkan memprioritaskan tenaga kerja lokal dengan komposisi 70 persen tenaga kerja asal Sidoarjo dan 30 persen dari luar daerah.

“Aturannya sudah jelas, tinggal bagaimana pengawasannya diperketat. Jangan sampai investor masuk, industri tumbuh, tapi tenaga kerja lokal tidak terserap maksimal,” tambahnya. **(dik/vga)**

### ✓ **Pemkab Amankan Rp 36 M untuk Perbaiki 1.200 RTLH**

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan terobosan besar dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Melalui lobi intensif ke pemerintah pusat, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana berhasil mengamankan anggaran sebesar Rp 36 miliar untuk merehabilitasi 1.200 rumah warga pada 2026.

Program ini menjadi lonjakan signifikan dibanding target awal yang hanya 164 unit rumah melalui kolaborasi Pemkab Sidoarjo dan Baznas. Dengan tambahan anggaran tersebut, total penanganan meningkat menjadi 1.364 unit, bahkan berpotensi menembus 1.500 rumah.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menegaskan, capaian ini merupakan



TERJUN LAPANGAN: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat meninjau kondisi rumah rusak milik warga.

wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah.

"Kami ingin memastikan masyarakat Sidoarjo tinggal di rumah yang layak, aman, dan sehat. Ini bukan sekadar program, tetapi bentuk kehadiran pemerintah untuk rakyat," tegasnya.

Ia juga memastikan akan turun langsung mengawal pelaksanaan program agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.

"Saya akan ikut mengawasi di lapangan. Dana ini harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya," tambahnya.

● Ke Halaman 10



### ✓ **Pemkab Amankan...**

Dalam pelaksanaannya, bantuan dari pemerintah pusat akan disalurkan langsung ke rekening desa dan dikelola oleh kelompok masyarakat (pokmas). Sementara itu, program dari Baznas dan Pemkab tetap melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).

mahan dan Permukiman (Perkim).

Setiap rumah diperkirakan menerima bantuan sekitar Rp 30 juta, yang difokuskan untuk memperbaiki struktur bangunan agar memenuhi standar kelayakan hunian.

Program RTLH ini ditargetkan mulai berjalan setelah proses pencairan ang-

garan rampung. Pemerintah berharap percepatan realisasi dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan tambahan anggaran tersebut, Pemkab Sidoarjo optimistis mampu menaikan jumlah rumah tidak layak huni secara signifikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. (dik/vga)





SERIUS: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Tirto Adi, memantau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

## 25.544 Siswa SMP Jalani TKA Berbasis Komputer

### ■ Sempat Terkendala di Hari Pertama

KOTA-Sebanyak 25.544 siswa SMP di Kabupaten Sidoarjo mulai menjalani Tes Kemampuan Akademik (TKA) berbasis komputer. Memasuki hari kedua, pelaksanaan ujian berlangsung lebih lancar setelah sempat terkendala teknis pada hari pertama.

Ribuan peserta tersebut berasal dari 193 SMP negeri dan swasta, masing-masing 48 SMP negeri dan 145 SMP swasta yang tersebar di seluruh wilayah Sidoarjo.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Tirto Adi, memastikan pelaksanaan TKA berjalan sesuai rencana. Berdasarkan hasil

monitoring di sejumlah sekolah, kesiapan internal dinilai sudah optimal. "Dari pengecekan di SMPN 1 Candi dan SMP PGRI 10 Candi, secara internal sudah siap," ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan TKA dibagi dalam beberapa sesi menyesuaikan ketersediaan fasilitas, terutama laboratorium komputer di masing-masing sekolah. TKA sendiri dijadwalkan berlangsung mulai 6 hingga 16 April 2026.

Selain itu, sekolah yang belum terakreditasi diwajibkan bergabung dengan sekolah lain agar pelaksanaan tetap optimal.

Sementara itu, Kepala SMPN 4 Waru, Khoirul Huda, menyebutkan sebanyak 283 siswa di sekolahnya

● Ke Halaman 10



## 25.544 Siswa SMP...

mengikuti TKA yang dibagi dalam tiga sesi. "Sesi pertama 100 siswa pukul 07.00–08.45, sesi kedua 100 siswa pukul 09.15–11.00, dan sesi ketiga 83 siswa pukul 11.30–13.15," jelasnya.

Menurutnya, pembagian sesi dilakukan karena keterbatasan fasilitas. Setiap ruang hanya menampung maksimal 20 siswa, dengan total lima ruang yang digunakan.

Pada hari pertama, sempat terjadi kendala teknis, namun dapat segera diatasi. "Ada kendala di Zoom, tapi langsung tertangani. Hari kedua ini sudah tidak ada kendala," ungkapnya.

Sebagai informasi, Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan asesmen standar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengukur capaian pembelajaran siswa secara objektif dan adil. (dik/vga)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



UMSIDA

**MANFAATKAN JARINGAN:** Dua mahasiswa Umsida mengoperasikan PLTS yang dikembangkan untuk mendukung produksi garam.

## Dukung Produksi Garam, Dosen Umsida Kembangkan PLTS Berbasis Internet

**SIDOARJO** - Tim peneliti Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) yang dipimpin Dosen Umsida Dr Ir Jamaaluddin mengembangkan inovasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berbasis Internet of Things (IoT) untuk mendukung produksi garam.

Jamaaluddin menjelaskan, sistem sengaja dirancang sebagai kampanye energi terbarukan. Teknologi ini mampu menjaga stabilitas produksi karena tidak bergantung pada kondisi cuaca seperti metode tambak tradisional.

Selain itu, sistem dilengkapi pemantauan jarak jauh melalui sensor suhu, kelembaban, dan kinerja panel secara real-time. "Inovasi telah kami berikan sebagai alat pembelajaran di SMK Pemuda Krian untuk mendukung praktik instalasi energi surya," katanya. (eza/hen)

## Jawa Pos

# Tak Terima Atribut Kampanye Dibakar, Calon Kades Sidokepong Lapor Polisi

Setelah Mediasi di Balai Desa Gagal

**SIDOARJO** - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Sidokepong, Kecamatan Buduran memanas. Salah satu calon kepala desa (cakades) melapor ke polisi usai atribut kampanye dirusak dan dibakar oknum masyarakat. Mediasi yang digelar di balai desa mengalami jalan buntu.

Ketua Panitia Pilkades Sidokepong Umar membenarkan adanya kejadian tersebut. Perselisihan dimulai dari terbakarnya satu baliho di depan salah satu perumahan. Kejadian itu lantas memicu emosi cakades dan pendukungnya.

"Saksinya dua orang. Baliho dirobohkan dan dibakar," kata Umar kemarin (7/4). Menurut dia, pendukung calon tidak terima dan mengajukan protes. "Sempat mediasi. Namun, mereka tetap tidak terima," tambah Umar.



**MEMANAS:** Baliho bergambar calon kepala desa terpasang di Jalan Sidokepong, Buduran. Pilkades di desa itu mendapat sorotan setelah terjadi perusakan.

Cakades dan pendukungnya lantas melakukan aksi pelaporan di Polresta Sidoarjo. Mereka meminta pelaku ditangkap.

Umar menegaskan, panitia terus berupaya meredam kemarahan pihak-pihak yang bertikai. Ada berkoordinasi

dengan polisi. Meski perselisihan, namun situasi masih kondusif.

## Jaga Kondusivitas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Probo Agus

menyatakan bahwa pelanggaran ke ranah hukum merupakan hak setiap warga negara. Tidak ada larangan terkait hal tersebut. "Boleh saja, itu kan hak setiap warga," ungkapnya.

Meski begitu, Probo meng-

ingatkan soal adanya mekanisme lain yang bisa diterapkan. "Saya menilai lebih baik diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa," imbuhnya. Probo memastikan, pemkab bakal terus memantau kondisi pemilihan di Sidokepong. (ful/hen)

## Setahun, 15 Perumahan Baru Ajukan Izin Pendirian

### Buduran dan Sukodono Jadi Incaran Pengembang

**SIDOARJO** - Jumlah perumahan di Kota Delta terus bertambah. Pertumbuhan itu bisa dilihat dari meningkatnya pengajuan izin pendirian perumahan. Selama 2025, Dinas Perkim Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas Perkim CKTR) Sidoarjo mencatat ada 15 izin pembangunan hunian yang masuk.

Kabid Tata Ruang Dinas Perkim CKTR Sidoarjo Triyanto mengatakan bahwa jumlah izin naik dibanding 2024. Pada tahun tersebut, hanya ada 14 izin yang masuk. "Ini menunjukkan kebutuhan hunian cenderung naik," kata Triyanto.

Dari data, sebaran pengembangan perumahan relatif merata di berbagai wilayah. Buduran dan Sukodono yang menjadi kawasan dengan jumlah terbanyak yang akan dibangun perumahan dengan masing-masing tiga izin. Disusul Candi, Krian, dan Prambon dengan dua lokasi. Semen-

tara itu, Krembung, Waru, dan Gedangan masing-masing satu lokasi.

Dari sisi luasan, pengajuan perumahan memiliki variasi cukup lebar. Mulai dari 9.000 meter persegi hingga 120.000 meter persegi. Atau setara 0,9 hektare hingga 12 hektare. Jika diakumulasikan, lahan untuk 15 perumahan seluas 180 hektare.

Triyanto menambahkan, sumber lahan pengembangan tidak hanya berasal dari lahan nonproduktif. Tetapi lahan produktif seperti sawah kadang juga dimanfaatkan. "Soal itu, kami tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," ujarnya. (ful/hen)



ANGGER BONDAN/JAWA POS

**TUMBUH MERATA:** Selain Buduran dan Sukodono, kawasan Gedangan juga banyak diincar pengembang. Ada perumahan yang sedang dibangun di kawasan tersebut.

## Jawa Pos

# Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Proyek Flyover Gedangan

## Pembebasan Lahan Dianggarkan Rp 200 M

**SIDOARJO** – Pemkab Sidoarjo memastikan jika kebijakan efisiensi tak menyentuh anggaran pembangunan. Sejumlah proyek strategis, termasuk pembebasan lahan *Flyover* (FO) Gedangan tetap jalan. Kebijakan efisiensi lebih banyak menasar anggaran kegiatan dinas.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo, Ainur Rohman mengatakan bahwa efisiensi diarahkan pada belanja non-prioritas. "Memang ada efisiensi. Namun, tidak menyentuh anggaran pembangunan," katanya kemarin (7/4).

Dia memastikan pembangunan tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah. Sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan

masyarakat tetap diprioritaskan. Seperti peningkatan jalan, normalisasi saluran, serta penguatan layanan kesehatan dan pendidikan.

## DED Selesai Pekan Ini

Progres pembangunan juga dipastikan terus berjalan. Termasuk pembebasan lahan untuk proyek FO Gedangan yang dianggarkan Rp 200 miliar. Ainur menegaskan, Detail Engineering Design (DED) untuk FO ditargetkan rampung dalam pekan ini.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo Chusnul Inayah menegaskan bahwa setidaknya ada empat proyek strategis yang tetap berjalan. Yakni FO Gedangan, betonisasi ruas jalan, RSUD Sedati, dan perbaikan sekolah. "Kami optimis proyek bisa terealisasi," katanya. (ful/hen)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Jembatan Jetis Retak, Hanya Bisa Dilalui Motor

Sudah Berlangsung Delapan Bulan

**SIDOARJO** - Sudah delapan bulan Jembatan Jetis di Kelurahan Lemahputro, Sidoarjo Kota, rusak. Namun, akses itu masih belum tersentuh perbaikan. Warga berharap

agar pemkab segera melakukan perbaikan agar jembatan bisa dilalui secara normal.

Saat ini, jembatan hanya bisa dilalui roda dua karena bagian ujungnya retak. Untuk mobil tak bisa melintas. Pengguna jalan khawatir kerusakan semakin parah jika tak segera diperbaiki.

"Untuk mengantisipasi kecelakaan, warga terpaksa pasang pembatas," kata Lukman, salah satu warga. Dia mengatakan bahwa warga juga memasang imbauan di gapura Jalan Jetis agar mobil tak masuk jembatan. "Ini sebenarnya akses alternatif. Maka, cukup banyak

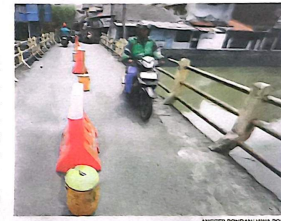
pengendara yang melintas," tambah Lukman.

### Targetkan Perbaikan Tahun Ini

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Dwi M. Mahmud mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengecekan terkait kondisi jembatan

tersebut. Jembatan tersebut memang sudah masuk waktu untuk dilakukan pemeliharaan.

Dari hasil peninjauan tim DPUBMSDA, beberapa titik jembatan mengalami retakan dan keropos sehingga perlu penanganan. "Segera kami usulkan untuk perbaikan. Kami upayakan tahun ini," jelasnya. (eza/hen)



CEGAH MOBIL LEWAT: Warga memasang pembatas jalan di jembatan untuk menghalau roda empat.

# Jawa Pos

## Perubahan Skema KDMP Bebani APBN dan APBD

Sambungan dari Hal 1

Pembayaran dialihkan ke pemerintah melalui mekanisme transfer ke daerah.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan tersebut berisiko menekan APBN, karena KDMP belum memiliki kapasitas keuangan memadai, terutama pada fase awal operasional. "KDMP akan kesulitan membayar pinjaman, apalagi masih tahun pertama. Risiko gagal bayar cukup tinggi, sehingga APBN harus menanggung cicilan ke bank-bank Himbara," kata Bhima kepada *Jawa Pos*, kemarin (7/4).

### Program Belum Matang

Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, perubahan skema tersebut

mencerminkan perencanaan program yang belum matang. Dalam aturan terbaru, pembiayaan KDMP disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk mempercepat pembangunan gerai, pergudangan, dan fasilitas koperasi. Selain itu, plafon pembiayaan kini dihitung per gerai sebesar Rp 3 miliar, bukan lagi per koperasi. Skema itu berpotensi membuat biaya program membengkak tanpa kejelasan manfaat ekonomi. "Ini menunjukkan KDMP tidak direncanakan dengan baik, program besar dan mahal dilakukan secara tambal sulam," ungkap Wijayanto.

Dia juga menyoroti skema pembayaran yang mengandalkan pemotongan dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), serta dana desa. Kebijakan itu dinilai memberatkan pemerintah

daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas. "Kemungkinan besar KDMP tidak akan pernah mandiri secara keuangan, sehingga Pemda (lewat DAU) harus menanggung beban keuangan permanen," papar Wijayanto.

Wijayanto juga mengingatkan pemerintah potensi resistensi masyarakat desa karena KDMP bisa bersaing dengan warung tradisional dan pelaku UMKM. Dia mencontohkan KDMP percontohan di kawasan Blok M yang diluncurkan pada pertengahan 2025, namun mengalami kendala operasional. "Bisa jadi 90 persen lebih KDMP akan berujung pada kegagalan. Kalau yang di pusat saja sulit bertahan, apalagi yang di daerah terpencil," katanya.

### Rencana Jangka Panjang

Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan

pengembangan jangka panjang untuk Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut, seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) akan didorong menjadi anggota koperasi. "Kalau dia menjadi anggota, mereka tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pemilik koperasi," paparnya.

Menurut dia, KPM dapat terlibat sebagai pegawai KDMP atau menjual produk hasil pelatihan Kemensos. Pemerintah juga menyesuaikan skema agar KDMP tak kalah bersaing dengan usaha yang sudah ada, termasuk berkolaborasi dengan BUMDes dan kelompok-kelompok usaha desa. "Koperasi diharapkan saling memperkuat. Pembeli diharapkan juga menjadi pemilik, ini yang istimewa," jelasnya. (mim/mia/aph)

CS Dipindai dengan CamScanner

# Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Perubahan Skema KDMP Bebani APBN dan APBD

### Diperkirakan Sulit Bertahan

**JAKARTA** - Perubahan skema pendanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi membebani keuangan pemerintah dan daerah. Sebab, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15/2026, pembayaran cicilan pembiayaan tak lagi ditanggung koperasi.

*Baca Perubahan... Hal 4*



SALMAN TOYIBI/JAWA POS

**SEDIAKAN SEMBAKO:** Warga berbelanja di KDMP Melawai, Jakarta, kemarin (7/4). Gerai itu dilaporkan masih berjuang membenahi kondisi keuangan yang minus setelah hampir setahun beroperasi.

CS Dipindai dengan CamScanner

## Jawa Pos

### Ketika Umsura Bina Puluhan UMKM di Prambon Sidoarjo Harap Omzet dan Kesejahteraan Terangkat

Isu keamanan dan kehalalan pangan yang jadi sorotan nasional hingga global dorong Universitas Muhammadiyah Surabaya turun memberikan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sidoarjo.

**T**im Pengabdian Masyarakat (Pengmas) dari Program Studi S1 Farmasi dan Profesi Apoteker, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya (FIK Umsura) menggelar kegiatan edukatif ke UMKM di Balai Desa Jedongcangkring, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Sabtu (4/4) lalu.

Ketua tim Pengmas, apt. Etik Wahyuningsih, S.Farm., M.Farm., menjelaskan sektor UMKM menjadi tulang

■ KE HALAMAN 11



DDK UMSURA

**GELAR EDUKASI** - Peserta bersama tim Pengabdian Masyarakat FIK Umsura berfoto usai kegiatan edukasi keamanan dan kehalalan pangan bagi pelaku UMKM di Balai Desa Jedongcangkring, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Sabtu (4/4).

CS Dipindai dengan CamScanner

**SURYA**  
Si Putih



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Harap Omzet...

■ DARI HALAMAN 1

pungung peredaran produk makanan dan minuman di masyarakat. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan pelatihan memadai terkait standar pangan aman dan halal.

"Masih banyak produsen UMKM di Desa Jedongcangkring yang belum tersentuh pelatihan terkait pemilihan

bahan baku, proses produksi, kemasan, hingga prosedur sertifikasi halal. Padahal, jaminan pangan yang aman dan halal sangat penting untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan sekaligus memenuhi aspek syariat," sebut Etik, Selasa (7/4).

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta yang terdiri dari perangkat desa, kader, serta pelaku UMKM yang memproduksi beragam olahan seperti sari kedelai,

minuman rempah, bakso, nugget, jamur, keripik, kopi, kue, hingga olahan ikan.

Seluruh peserta diketahui belum pernah mendapatkan pembinaan serupa sebelumnya.

Untuk memastikan materi tepat sasaran, tim Pengmas menghadirkan sejumlah pemateri ahli. Dr. apt. Isaeni, MS., menekankan pentingnya aspek keamanan dan kehalalan pangan.

Etik menjelaskan peran

kemasan sebagai pelindung kualitas sekaligus instrumen branding produk yang aman dan halal.

Selain itu, Siti Mardiyah, anggota tim memberikan pendampingan teknis kepada peserta untuk mengakses aplikasi SEHATI guna mendaftarkan sertifikasi halal secara gratis.

Pelatihan semakin interaktif saat apt. Laili Irfanah, S.Farm., M.Farm., bersama tim dosen dan mahasiswa

mendemonstrasikan uji sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya seperti boraks dan formalin pada sampel makanan, termasuk mie basah, tahu, bakso, kerupuk, dan ikan asin.

Peserta juga dikenalkan ciri-ciri makanan yang mengandung pewarna berbahaya seperti methanyl yellow dan rhodamin B.

Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap para pelaku UMKM mampu menghasilkan

produk pangan yang aman, halal, dan berkualitas, sekaligus memanfaatkan peluang sertifikasi halal gratis.

"Upaya ini diyakini dapat meningkatkan daya saing usaha serta menjadikan Desa Jedongcangkring sebagai percontohan pengembangan ekosistem UMKM berbasis keamanan dan kehalalan pangan," harap Etik.

Pt Kepala Desa Jedongcangkring, Mochammad Arianto, menyambut baik kegi-

atan ini. Ia menilai potensi UMKM di desanya sangat besar dan membutuhkan pendampingan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. "Dengan kualitas produk yang lebih terjamin, kami berharap omzet pelaku UMKM meningkat dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat. Kami juga berharap ilmu yang didapat hari ini bisa disebarluaskan ke warga lainnya," ungkapnya. (sulvi sofiana)

CS Dipinda dengan CamScanner

WALAH MASYARAKAT  
**SURYA**  
Sidoarjo

## ■ BBM

# Pemerintah Matangkan Formula Harga Non-Subsidi

PEMERINTAH tengah mematangkan pembahasan terkait penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di tengah gejolak harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, proses penyusunan formula harga tidak hanya dilakukan internal pemerintah, tetapi juga melibatkan pelaku usaha, termasuk operator SPBU swasta.

“Menyangkut harga BBM non-subsidi, kami sedang melakukan pembahasan. Proses ini tentu melibatkan badan usaha swasta lainnya. Saat ini kami masih mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana,” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, pemerintah berhati-hati dalam menentukan kebijakan agar tidak menimbulkan gejolak, baik pada segmen BBM subsidi maupun non-subsidi. Penetapan harga baru diharapkan tetap menjaga daya beli masyarakat.

Meski demikian, Bahlil belum memastikan kapan keputusan final akan diumumkan. Ia hanya menekankan bahwa tim saat ini tengah bekerja intensif menyelesaikan perhitungan dan simulasi kebijakan.

“Sekarang kami masih melakukan exercise dalam rapat. Nanti kalau sudah ada hasilnya, akan kami sampaikan,” tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi per 1 April 2026, meski konflik di Timur Tengah membuat harga energi global melonjak. Harga BBM non-subsidi juga belum mengalami penyesuaian, seiring pemerintah yang masih mencermati perkembangan situasi global dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. (pps/rak)

CS Dipindai dengan CamScanner



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Sebanyak 6.200 Kasus TBC di Kabupaten Sidoarjo Tercatat di Tahun 2026

Merujuk pada Laporan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) tahun 2026, jumlah kasus TBC di Kabupaten Sidoarjo tercatat ada sebanyak 6.200 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 5.813 kasus.

Dari total jumlah kasus TBC di tahun 2026 di Kabupaten Sidoarjo, ada sebanyak 5.641 pasien, telah memulai pengobatan. Persentase keberhasilan yang ditargetkan belum sepenuhnya tercapai. Sampai saat ini masih berada di angka 86 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, M.Kes, menegaskan Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam penanganan kasus TBC. Dalam memperingati Hari Tuberkulosis (TBC) Sedunia tahun 2026 ini, menurut dr Lakhsmie, menjadi upaya Dinkes Sidoarjo untuk bersin-

ergi bersama masyarakat dalam menekan penularan penyakit TBC di Kabupaten Sidoarjo.

Acara yang digelar oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo di aula Delta Graha Setda Kabupaten Sidoarjo, pada Selasa pagi (7/4) kemarin, mengambil tema "Satu TB atau Sinergi Aksi Tuntaskan Tuberkulosis".

Turut hadir pula dalam acara ini diantaranya 31 Kepala Puskesmas di Sidoarjo beserta para tenaga kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan, sejumlah klinik kesehatan dan komunitas Yabhysa atau yayasan Bhanu Yasa Sejahtera penanggulangan TBC.

Melalui momentum peringatan Hari TBC sedunia, Dinkes Sidoarjo, menurut dr Lakhsmie, akan terus mengupayakan percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Sidoarjo, dengan menekankan kolaborasi bersama, antara sektor kesehatan dengan stakeholder terkait. "Ini untuk mewujudkan Indonesia bebas TBC pada tahun 2030 nanti," ujarnya.

Dalam laporannya, dr Lakhsmie mengatakan pada saat ini kasus TBC masih menjadi perhatian serius di dunia. Khususnya di kawasan Asia yang terdapat sebanyak 1.090.000 kasus dengan angka kematian mencapai 125.000 jiwa. "Di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus TBC tertinggi di Indonesia," katanya.

Dirinya menegaskan bahwa

Kabupaten Sidoarjo juga masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam penanganan kasus TBC. Khususnya pada inisiasi pengobatan pasien. "Di daerah ini masih banyak pasien yang sudah terdiagnosis, tetapi belum mau melakukan pengobatan secara rutin," sebut mantan Sekretaris Dinkes Sidoarjo itu.

Dirinya memotivasi para peserta peringatan Hari TB sedunia itu, sesuai dengan kesepakatan dari tim penanggulangan eliminasi TBC di Kabupaten Sidoarjo, maka di tahun 2028 nanti, diharapkan Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu Kabupaten yang mendapatkan predikat tereliminasi dari kasus TBC.

Langkah-langkah yang ditempuh, diantaranya percepatan penemuan kasus, pengobatan sampai sembuh, menghentikan stigma dan diskriminasi, juga menghentikan

penularan dengan pemberian TPT. "Temukan, obati sampai sembuh atau TOSS," ujarnya.

Pada kesempatan itu Dinkes Sidoarjo, sempat memberikan apresiasi sebanyak sembilan nominasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo

atas capaian kerja sejauh ini dalam menanggulangi kasus TBC. Harapannya, bisa memotivasi yang lain, agar semua sektor kesehatan yang ada di kabupaten Sidoarjo dapat bekerja lebih keras untuk mengeliminasi kasus TBC. [kus.mg6.ca]



Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo bersama para peserta undangan peringatan Hari Tuberculosis sedunia tahun 2026 di Kabupaten Sidoarjo.

CS Dipindai dengan CamScanner

WALAH MATA  
**SURYA**  
Jurnal Bina Jiwa Teras